OMBUDSMAN SOROTI PENURUNAN KUALITAS PELAYANAN PEMKO BATAM

Sabtu, 05 Maret 2022 - Nina Aryana

Ombudsman Kepulauan Riau menyoroti standar kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Batam.

Menurut Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, terjadi penurunan kualitas pelayanan publik di Pemko Batam.

"*Kami agak kecewa, karena tahun 2018 Pemko Batam sebenarnya kami nilai telah menerapkan standar kepatuhan tinggi pelayanan publik*," ujar Lagat, Jumat (4/3/2020) malam.

Tahun ini, pihaknya meinginkan kepala daerah dapat menjadi pemicu guna memastikan standar kualitas pelayanan publik sudah benar diterapkan.

Lagat mengatakan, ada 4 substansi di Pemko Batam yang dinilai dalam menerapkan standar pelayanan. Diantaranya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Administrasi Penduduk (Adminduk).

Ia menyarankan agar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi untuk membentuk tim review dari Inspektorat supaya memastikan apakah OPD-OPD yang dimaksud patuh atas perintah kepala daerah atau tidak.

"*Jangan-jangan cuma pencitraan saja. Karena sering kali demikian, kepala daerah komitmen sangat besar tapi pejabat di bawahnya tidak patuh dalam menjalankan arahan dari kepala daerahnya*," ujarnya.

Harapan Ombudsman Kepri sama, agar tahun ini Pemko Batam dapat meraih predikat kepatuhan tinggi penerapan standar pelayanan publik.

"*Membaiknya pelayanan publik dengan penerapan standar maka niscaya akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau Pemko dan BP Batam menerapkan itu maka kesejahteraan akan meningkat,*" kata Lagat.